repository.ub.ac.id

SUMMARY

Milatul Hakimah, 2019, **Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan bagi Orang Asing di Kota Malang** (Studi tentang Pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang), Skripsi, Imam Hanafi, Dr., M.Si., MS., Halaman 196, xv.

Penelitian ini dilakukan untuk mengatahui implementasi kebijakan administrasi kependudukan bagi Orang Asing di Kota Malang. Beberapa fakta yang menjadi dasar masalah dalam penelitian ini yaitu fakta bahwa 1) Kota Malang juga memiliki masalah yang sama dengan beberapa Pemerintah Daerah lain yaitu tidak semua orang asing yang tinggal di Kota Malang telah terdata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2) Kota Malang dihadapkan pada masalah lemahnya kedisiplinan pelaporan kependudukan; dan 3) Kota Malang adalah kota pendidikan dan orang asing di Kota Malang sebagian besar adalah mahasiswa, sehingga menuntut pemerintah Kota Malang menyediakan pelayanan kependudukan yang prima untuk membantu memudahkan kinerja seluruh instansi terkait dalam pengawasan orang asing di Kota Malang.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Situs dalam penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan di Kota Malang. Penelitian ini berfokus pada 4 (empat) aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang merujuk pada model implementasi kebijakan yang dibuat oleh George C Edward III. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen pembantu dalam mengumpulkan data adalah interview guide, kamera dan alat perekam suara. Data analisis penelitian ini menggunakan Model Interaktif Miles dan Huberman. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan cara triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal di Kota Malang secara umum telah terlaksana dengan baik. Walaupun pada pelaksanaannya memiliki dua kendala, yaitu 1) rendahnya kemampuan personel pelaksana layanan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa asing; dan 2) ketidaksesuaian antara isi kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan yaitu tidak berlakunya sanksi administratif atau denda bagi Orang Asing yang terlambat melakukan pelaporan. Adapun saran yang diajukan oleh Penulis, yaitu 1) pembuat kebijakan harus mensyaratkan kemampuan komunikasi menggunakan bahasa asing bagi personel layanan atau harus menyediakan pelatihan bahasa yang lebih intensif terhadap personel; dan 2) pembuat kebijakan harus harus tetap menjalankan isi kebijakan dengan benar atau jika tidak bisa, maka harus merubah isi kebijakan.

Kata kunci: Administrasi Kependudukan, Implementasi Kebijakan

UNIVERSITAS BRAWIJAYA